



# KAJIAN REVISI INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

## (TAWARAN KERANGKA KONSEP IDI REVISI)

# LATAR BELAKANG

Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas sedang menyelenggarakan studi penelusuran (*background study*) IDI yang dimaksudkan untuk melihat kembali latar belakang pengukuran demokrasi yang digunakan dalam survei IDI, yang telah dilakukan secara regular sejak 2009. Studi ini merupakan kolaborasi yang melibatkan tiga lembaga riset, yakni Cakra Wikara Indonesia, The SMERU Research Institute, dan PUSAD Paramadina. Alur kajian terdiri dari empat fase, yaitu:

1. Kajian literatur terhadap teori-teori demokrasi, dan kajian perbandingan berbagai indeks demokrasi.
2. Finalisasi kerangka teori dan konsep, operasionalisasi konsep, metode pengukuran, dan metode pengumpulan data.
3. Uji coba di lapangan (*pilot test*), identifikasi sumber data, dan pembobotan instrumen
4. Penyusunan laporan akhir dan rekomendasi.

# TAHAPAN KEGIATAN

## Fase 1: Kajian literatur

- Mei-Juli 2018
- 1. Pemetaan teori dan konsep demokrasi
- 2. Perbandingan antar indeks demokrasi

## Fase 2: Operasionalisasi konsep

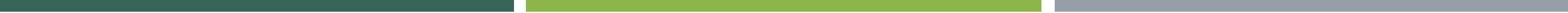
- Agustus-September 2018
- 1. Finalisasi teori dan definisi konseptual
- 2. Rancangan operasionalisasi konsep
- 3. Identifikasi teknik pengumpulan data dan sumber data

## Fase 3: Uji coba kelayakan indikator

- September-November 2018
- Tingkat nasional dan provinsi
- 1. Reviu draft indikator
- 2. Identifikasi tantangan pengumpulan data
- 3. Penyusunan pedoman pengumpulan data dan pengukuran indikator
- 4. Survei pembobotan

## Fase 4: Penulisan laporan

- Desember 2018
- 1. Hasil kajian teoritis dan kerangka teori IDI
- 2. Hasil kajian operasionalisasi konsep, instrument pengukuran, dan pembobotan
- 3. Hasil kajian teknik pengumpulan data dan sumber data
- 4. Rekomendasi



# TAWARAN KONSEP DAN PRINSIP IDI REVISI

# KONTEKS DAN TANTANGAN DEMOKRASI INDONESIA

- **Tantangan Konsolidasi Demokrasi Pasca Rezim Otoriter:** Indonesia merupakan negara pasca rezim otoriter yang telah melalui tahapan transisi demokrasi dan mengalami tantangan dalam konsolidasi demokrasi. Dimana transisi demokrasi terjadi pada sebatas pembentukan institusi demokratis dan pelaksanaan demokrasi elektoral.
- **Reorganisasi Elite dan Pembajakan Demokrasi Elektoral:** Elite yang dibesarkan oleh rezim orde baru mampu bertahan pada masa transisi dan mampu menyusun ulang kekuatan politik-ekonominya. Demokrasi elektoral dan desentralisasi menjadi arena baru bagi para elite untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingannya.
- **Ketimpangan ekonomi:** Ketimpangan akses sumberdaya ekonomi dan pemusatan kekayaan pada elite mendorong mereka untuk mempertahankan kekuatan ekonomi dengan beragam cara termasuk terlibat dalam kegiatan politik.
- **Masyarakat Sipil Terfragmentasi:** Tidak terkonsolidasinya berbagai isu dan agenda masyarakat sipil.

(Robison-Hadiz 2004; Winters 2011, Aspinall-Fealy 2003; Bunte-Ufen 2009)

# DEFINISI DEMOKRASI

- Demokrasi berdasarkan tantangan dan masalah di Indonesia dimaknai sebagai upaya penyebaran kekuasaan (*dispersion of power*) untuk mencegah konsentrasi sumber kekuasaan pada sekelompok elite (Dahl 1971; Bollen 1980; Cho 2012).
- Demokrasi dimaknai sebagai situasi dimana kekuasaan dan sumber daya didistribusikan secara merata kepada semua anggota komunitas (Cho 2012).
- Penyebaran kekuasaan harus berjalan di tiga ranah: politik, ekonomi dan sosial (masyarakat sipil). Karena kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh medan politik saja, tetapi juga melalui hubungan berbagai macam kekuatan yang berlapis-lapis yang terdapat pada ranah politik, ekonomi, dan masyarakat sipil (Cho 2012).
- Demokrasi merupakan formasi sejarah yang terbentuk melalui proses berkelanjutan yang kemudian menghasilkan suatu bentuk yang berbeda-beda dalam waktu yang berbeda dan ruang yang berbeda. Dalam hal ini, demokrasi dimaknai sebagai akibat dari kondisi perjuangan politik, ekonomi, dan sosial.

# KONDISI NON DEMOKRATIK: MONOPOLI DI TIGA RANAH

Monopoli Politik	Monopoli Ekonomi	Monopoli Sosial
<p>Kondisi ketika satu individu atau kelompok menguasai sumber daya politik berupa posisi politik atau kekuasaan dalam negara.</p> <p>Hal ini tidak memungkinkannya hadir kekuatan politik lain dan tidak adanya kompetisi politik.</p> <p>Monopoli politik memiliki kaitan dengan monopoli di ranah lain berupa eksklusivitas sosial yang menyebabkan diskriminasi dan eksklusivitas ekonomi yang menyebabkan ketimpangan.</p>	<p>Merupakan dominasi pasar dan industri secara tertutup oleh satu kekuatan atau kelompok perusahaan sehingga menyebabkan terkonsentrasinya sumber daya ekonomi dan memunculkan ketimpangan.</p> <p>Monopoli ekonomi berkaitan dengan monopoli di ranah lainnya karena akumulasi kekayaan ekonomi juga menghambat hadirnya kekuatan dan otonomi politik untuk menjamin penyebaran kekuasaan.</p> <p>Pada ranah sosial, monopoli ekonomi menghadirkan diskriminasi dan ketidakadilan sosial serta menajamnya segregasi sosial berbasis kelas ekonomi.</p>	<p>Merupakan dominasi kelompok partikular berdasar pada agama, ras, etnis, jenis kelamin, lokalitas atas sumber daya sosial.</p> <p>Hal tersebut terwujud dalam diskriminasi pada kepercayaan, rasa solidaritas, martabat, dan kehormatan sosial yang beragam.</p> <p>Monopoli sosial berkaitan dengan monopoli di ranah lainnya karena diskriminasi terjadi karena eksklusivitas politik dan juga ketimpangan sumber daya ekonomi serta sebaliknya diskriminasi sosial menghambat akses pada munculnya ragam kekuatan politik dan terhambatnya akses pada sumber daya ekonomi.</p>

# DEMOKRASI SEBAGAI DEMONOPOLISASI

## Demonopolisasi Politik

Proses penyebaran kekuasaan politik yang ditandai oleh terjaminnya kebebasan politik untuk berkompetisi dan hadirnya kekuatan politik otonom yang terlepas dari represi/tindak kekerasan negara.

Kontrol terhadap kekuatan politik hadir dalam wujud kesetaraan dalam partisipasi dan perwakilan politik di berbagai institusi politik pengambil keputusan

## Demonopolisasi Ekonomi

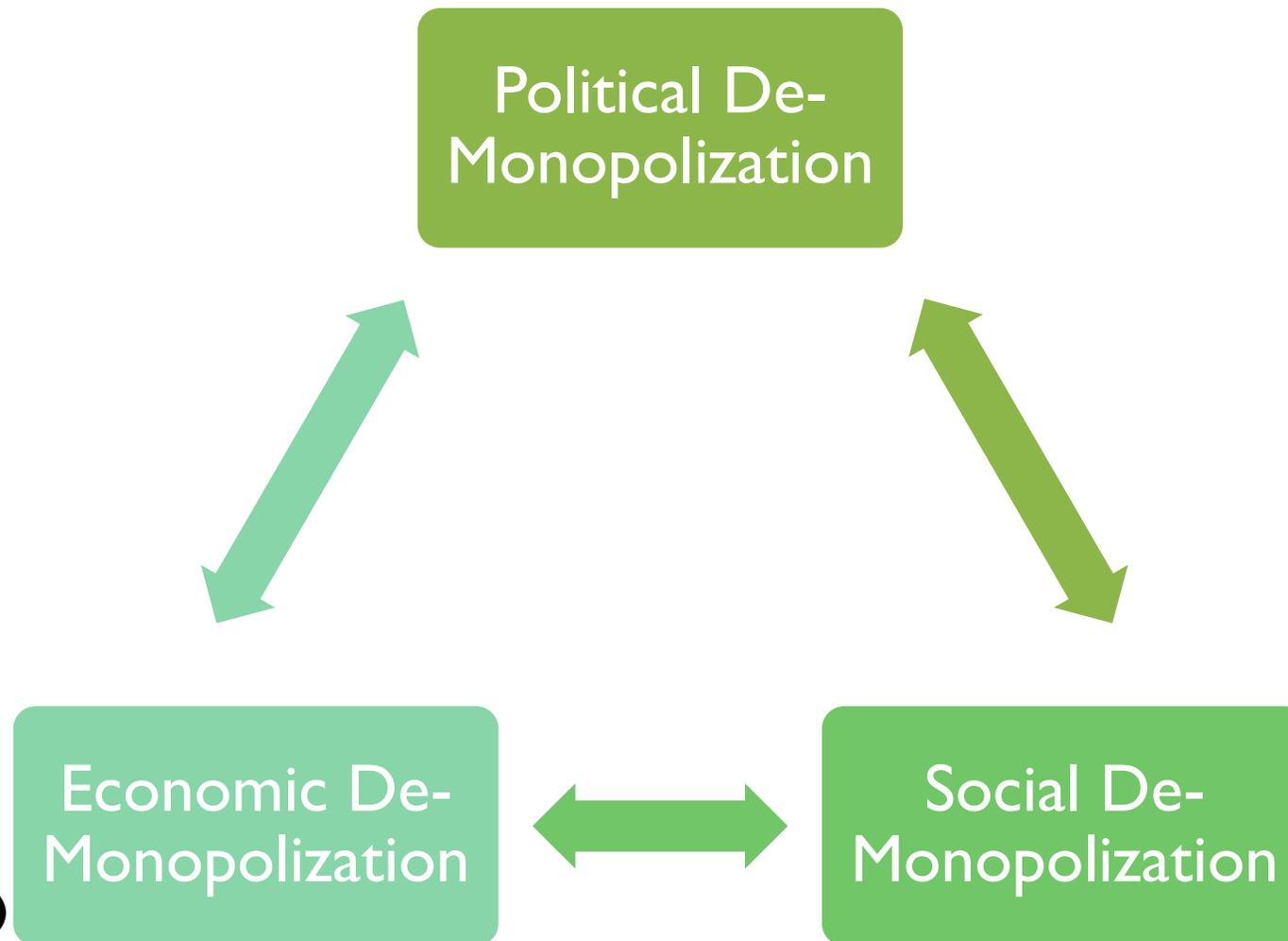
Penyebaran sumber daya ekonomi yang terkonsentrasi pada satu kelompok yang ditandai oleh terbukanya akses kompetisi dan kesetaraan untuk meraih sumber daya ekonomi tanpa diskriminasi.

Distribusi sumber daya ekonomi negara untuk memastikan warga terbebas dari kemiskinan.

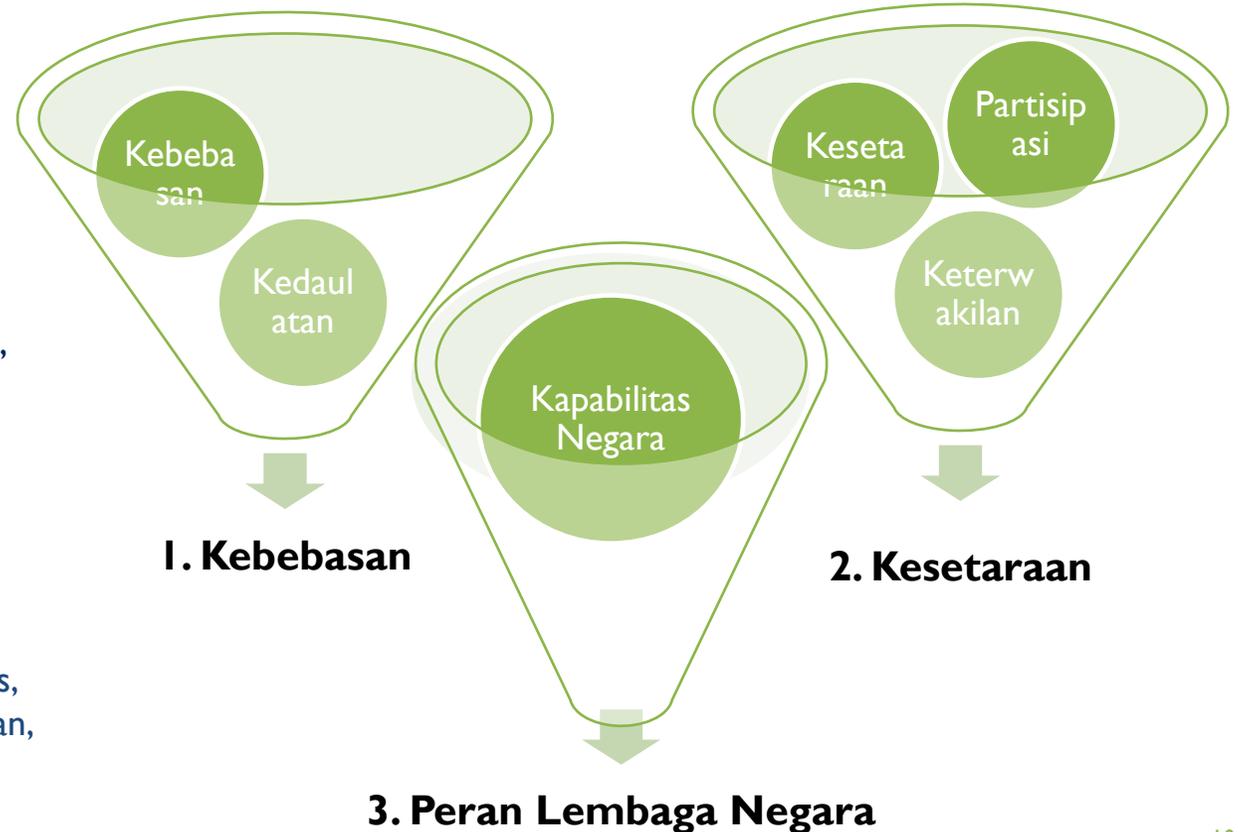
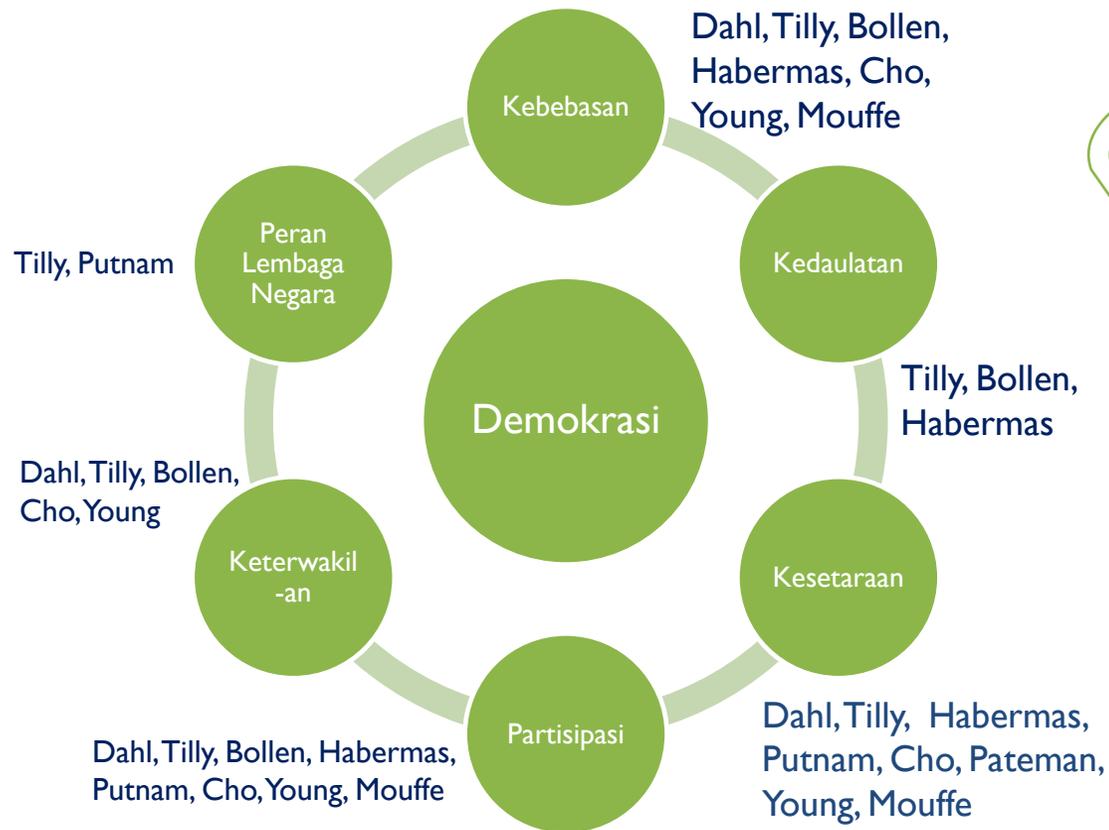
## Demonopolisasi Sosial

Proses penyebaran sumber daya sosial untuk mengikis diskriminasi dengan menghadirkan kepercayaan, solidaritas, martabat dan penghormatan atas keragaman nilai dan budaya

# TIGA ARENA PERIMBANGAN KEKUASAAN



# PRINSIP DEMOKRASI DAN PENYEDERHANAANNYA



Enam Prinsip Demokrasi merupakan instrumen untuk menjamin terjadinya persebaran kekuasaan di ranah politik, ekonomi dan masyarakat sipil

# SINTESIS PRINSIP

Politik	Ekonomi	Sosial
Kebebasan: Warga terjamin kebebasannya untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.	Kebebasan: Masyarakat memiliki hak dalam melakukan aktivitas ekonomi dan berserikat untuk mencapai kesejahteraan.	Kebebasan: Warga terlindungi dan terpenuhi hak sosial budayanya.
Kesetaraan: Setiap warga atau kelompok warga memiliki kesetaraan akses secara adil baik untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik maupun mewakili kepentingannya dalam lembaga pembuat kebijakan.	Kesetaraan: Masyarakat memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses sumber daya dan fasilitas ekonomi, serta berpartisipasi secara kolektif dalam upaya mencapai kesejahteraan.	Kesetaraan: Warga memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses barang dan layanan sosial sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya.
Peran Lembaga Negara: Negara melindungi kebebasan dan kesetaraan warga untuk berpartisipasi politik.	Peran Lembaga Negara: Negara melindungi kebebasan dan kesetaraan warga untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.	Peran Lembaga Negara: Negara melindungi kebebasan dan kesetaraan warga dalam menjalankan aktivitas sosial.

Politik	Ekonomi	Sosial
<p><b>Kebebasan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebebasan memilih secara luber jurdil dalam Pemilu (Pasal 2, 6A, 18, 19, 22C, 22E)</li> </ul>	<p><b>Kebebasan:</b></p> <p>Demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (Pasal 33 Ayat 4)</p>	<p><b>Kebebasan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pikiran (Pasal 28E)</li> <li>- Kebebasan dari diskriminasi, kekerasan, persekusi dan penghormatan terhadap identitas budaya (Pasal 28 I)</li> <li>- Kebebasan mengakses dan memperoleh informasi (Pasal 28 F)</li> </ul>
<p><b>Kesetaraan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D)</li> </ul>	<p><b>Kesetaraan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28 D)</li> </ul>	<p><b>Kesetaraan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlakukan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D)</li> </ul>
<p><b>Peran Lembaga Negara:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Negara memprioritaskan anggaran pendidikan 20% dari APBN (Pasal 31)</li> <li>- Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. (Pasal 34 ayat 3)</li> </ul>	<p><b>Peran Lembaga Negara:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Negara menguasai cabang produksi yang menjadi hajat hidup orang banyak (Pasal 33 ayat 2)</li> <li>- Negara menguasai bumi dan air dan kekayaan alam dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat 3)</li> </ul>	<p><b>Peran Lembaga Negara:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh warga negara (Pasal 34)</li> <li>- Negara menjamin warga negara memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya (Pasal 29)</li> </ul>



PENUTUP

# TEMUAN TIGA ARENA PERIMBANGAN KEKUASAAN

1. Demonopolisasi politik seharusnya memberikan kesejahteraan untuk ranah ekonomi dan mampu mengatasi praktik diskriminasi dalam ranah sosial.

Political De-Monopolization

3. Aparat negara dan lembaga pemerintah harus bersikap adil dan aktif memperjuangkan hak-hak sosial warga.

2. Kesejahteraan hanya bisa terwujudkan dengan adanya peran negara yang aktif dalam memenuhi hak ekonomi dan sosial warga.

1

2

**Interaksi antar ranah terjadi dalam konteks komunitas digital**

3

1

4. Partisipasi warga dalam kehidupan sosial harus dapat mendukung partisipasi warga dalam ekonomi.

Economic De-Monopolization

Social De-Monopolization

4